

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**

### **AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN JAVA ISLAND IN 2010-2014**

oleh:

febrika nurtiyas

fakultas ekonomi, universitas negeri yogyakarta

Febrikanurtiyas@yahoo.co.id

Pembimbing: Mustofa, M. Sc.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Survei Upah Buruh (SUB) oleh BPS, Survei Biaya Hidup oleh BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel model *random effect* (REM) dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan program *EViews versi 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa di bawah nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional 2) Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi; 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi; 4) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun, sementara penelitian lain menggunakan jangka waktu yang panjang, sekitar dua puluh tahunan; 5) Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Propinsi 6) Kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 86.73%. Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kata Kunci: Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan per Kapita, Upah Minimum Propinsi

#### **Abstract**

*The study aimed to find out the factors affecting the Provincial Minimum Wage in Java Island in 2010-2014. This was a quantitative study. The data were obtained from the Labor Wage Survey (LWS) by the Central Bureau of Statistics (CBS), the Living Cost Survey (LCS) by CBS, the National Labor Force Survey (NLFS), and the Regional Income Special Survey (RISS) by CBS. The data analysis in the study was panel data regression analysis using the random effect model (REM) with the Ordinary Least Square (OLS) model employing the program of EViews version 8. The result of the study showed that: 1) the Provincial Minimum Wage in Java Island was below the average National Provincial Minimum Wage; 2) the Consumer Price Index did not significantly affect the Provincial Minimum Wage; 3) the Labor Force Participation Rate negatively affected Provincial Minimum Wage; 4) the Gross Regional Domestic Product negatively affected Provincial Minimum Wage because the study used only a short period of time is five years, while another study using a long period of time around two forties; 5) the Income per Capita positively affected Provincial Minimum Wage; and 6) the contribution of all the independent variables to account for the dependent variable was 86.73%. The remaining 13.27% was accounted for by other variables outside the model.*

*Keywords: Consumer Price Index, Labor Force Participation Rate, Gross Regional Domestic Product, Income per Capita, Provincial Minimum Wage*

## PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah pihak yang menawarkan jasa, dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, tenaga kerja memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih sedikit pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan, dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya

sedikit pengusaha yang secara sadar dan sukarela untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.

Upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha, dan pekerja, pemerintah perlu mengatur masalah pengupahan ini yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Di Indonesia, masing-masing Propinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Namun dalam penentuannya, masih ada Propinsi yang menetapkan Upah Minimum

Propinsi (UMP) di bawah nilai rata-rata UMP Nasional, khususnya di Pulau Jawa. Hampir semua Propinsi di Pulau Jawa menetapkan UMP di bawah rata-rata UMP Nasional, sementara ada beberapa propinsi di Pulau lain yang menetapkan Upah Minimum Propinsi di atas nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional.

Penetapan upah minimum didasarkan pada standar biaya hidup. Namun, rata-rata tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) di Pulau Jawa masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak pekerja. Pemerintah menetapkan UMP yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan digunakan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, fakta di lapangan menyebutkan secara rata-rata Upah Minimum Propinsi baru memenuhi sekitar 90% dari Kebutuhan Hidup Layak. Komponen KHL yang ditetapkan pemerintah belum dapat mewakili kebutuhan para pekerja.

Pemerintah menetapkan KHL dengan 60 komponen, tetapi para pekerja menuntut KHL dengan 84 komponen. Dalam prakteknya, KHL ini masih banyak terjadi ketidakadilan bagi pekerja. Oleh sebab itu, KHL dirasa kurang apabila digunakan sebagai dasar penetapan nilai UMP, sehingga perlu menggunakan faktor lain yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks perubahan biaya hidup. Dengan menggunakan IHK, maka pemerintah dapat mengetahui harga-harga saat ini, sehingga tingkat upah

dapat disesuaikan dengan harga yang sedang terjadi.

Upah pekerja dalam jangka panjang akan memiliki kemampuan yang semakin sedikit dalam membeli barang, dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini terjadi akibat naiknya harga-harga barang, dan jasa tersebut. Kenaikan tersebut akan menurunkan daya beli dari upah. Pada hakekatnya, harga barang dan upah akan selalu naik, dan yang menjadi masalah adalah naiknya tidak serentak dan juga besarnya tidak sama besar. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana upah akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga dalam hal ini tingkat upah perlu disesuaikan dengan kenaikan harga barang agar daya beli upah pekerja akan meningkat.

Selain menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai UMP. TPAK ini dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja.

Jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa sendiri selama periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan dari 67.741.578 pada tahun 2010 menjadi 71.128.148 pada tahun 2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh peningkatan penduduk

berumur 15 tahun ke atas pada periode yang sama, sedangkan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013, dan 2014.

Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sehingga tingkat penawaran tenaga kerja di Pulau Jawa meningkat. Jika penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka nilai upah akan memburuk.

Penetapan besarnya Upah Minimum Propinsi yang baru, juga mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Teori upah efisiensi menyebutkan, dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk memberi nutrisi yang baik untuk anaknya, sehingga akan memberi dampak yang besar dalam peningkatan produktivitasnya. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh di atas upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah output yang diproduksi akan meningkat.

Jumlah tingkat output yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini penting jika digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jadi jika laba meningkat, maka tingkat upah minimum selanjutnya juga meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap Propinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB ini dibarengi dengan peningkatan Upah Minimum Propinsi (UMP), walaupun masih ada laju Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa pada tahun tertentu masih di bawah nilai laju Produk Domestik Regional Bruto.

Perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu dapat pula menjadi faktor yang mempengaruhi nilai Upah Minimum Propinsi. Tingkat kemakmuran suatu daerah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya PDRB karena PDRB tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari PDRB. PDRB suatu daerah tinggi, namun belum tentu daerah tersebut makmur karena jumlah penduduk di daerah tersebut juga tinggi, sehingga ukuran yang lebih tepat untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah dengan menggunakan pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita adalah hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama, Pendapatan per kapita juga merefleksikan

PDRB per kapita. Nilai pendapatan per kapita di Pulau Jawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu 37.022.470,00 pada tahun 2010, dan 44.794.390,00 pada tahun 2014.

Pendapatan per kapita ini akan mempengaruhi nilai Upah Minimum Propinsi karena pendapatan per kapita merupakan tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Ketika pendapatan per kapita naik, maka nilai Upah Minimum Propinsi juga meningkat karena masyarakat akan mampu membeli barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, sehingga laba para pengusaha akan meningkat, dan pengusaha mampu membayar pekerja dengan upah yang lebih tinggi. Jadi tingkat kemakmuran masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai upah minimum.

Rata-rata pendapatan per kapita di Pulau Jawa memiliki nilai di bawah nilai pendapatan per kapita nasional, kecuali DKI Jakarta. Hal ini yang menyebabkan nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa menjadi rendah. Penghitungan upah minimum di suatu Propinsi ditentukan berdasarkan oleh beberapa faktor. Namun, penelitian ini hanya dibatasi pada faktor Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan per Kapita karena penelitian ini hanya menggunakan faktor makro dengan melihat keadaan ekonomi, dan tenaga kerja di Pulau Jawa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Upah**

Upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya, Sadono Sukirno (2002: 353).

### **Upah Minimum**

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya .

### **Indeks Harga Konsumen**

Indeks Harga Konsumen (IHK) menurut Gregory Mankiw (2013: 26) adalah ukuran biaya keseluruhan barang, dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ahli statistik pemerintah secara rutin menghitung, dan melaporkan IHK. Ketika menghitung IHK, Departemen Statistik menggunakan data tentang harga-harga barang, dan jasa.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, (Gregory Mankiw, 2013: 111).

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut Gregory Mankiw (2013: 6) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input seperti tenaga kerja, dan modal menjadi output.

### **Pendapatan per Kapita**

Menurut Sadono Sukirno (2013: 424) pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada periode tertentu. Nilai pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014., data yang diteliti meliputi data Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto Pendapatan per kapita, dan Upah Minimum Propinsi (UMP).

Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section. Data time series periode 2010-2014 sedangkan cross section adalah 6 propinsi di Pulau Jawa.

### **Tahap-Tahap Pengolahan data**

Tahap-tahap pengolahan data pada penelitian ini yaitu editing data yang meliputi

kelengkapan, kesempurnaan data, konsistensi data, dan keseragaman satuan perhitungan. Tahap ke dua yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

### **Variabel Penelitian**

Upah Minimum Propinsi (Variabel Dependen) adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Satuan Upah Minimum Propinsi dinyatakan dalam Rupiah.

Indeks Harga Konsumen (Variabel Independen) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Satuan Indeks Harga Konsumen dinyatakan dalam persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Variabel Independen) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Satuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dinyatakan dalam persen.

Produk Domestik Regional Bruto (Variabel Independen) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Satuan Produk Domestik Regional Bruto dinyatakan dalam Rupiah.

Pendapatan per Kapita (Variabel Independen) merupakan representasi tingkat kemakmuran dan aktivitas perekonomian masyarakat. PDRB per kapita diperoleh dari pembagian antara pendapatan domestik regional bruto pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di wilayah yang bersangkutan. Satuan Pendapatan per Kapita dinyatakan dalam Rupiah.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari Survei Upah Buruh (SUB) oleh BPS, Survei Biaya Hidup oleh BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS.

### Analisis Data Panel

Data panel adalah gabungan data *cross section* dan *time series*. Dalam regresi data panel terdapat empat model yang dapat digunakan, yaitu model OLS pooled, model fixed effects least square dummy variabel (LSDV), model fixed effects within-group dan model random effect (Gujarati, 2013: 241). Pemilihan model yang akan dipakai, diseleksi dengan uji spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi yaitu efek tetap (fixed effects) atau efek random (random effect).

### Spesifikasi Model Regresi

Model penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum ini dikembangkan oleh Arnaud (2005)

menggunakan data panel yang ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnMWit} = \beta_0 + \beta_1\text{CPIit} + \beta_2\text{EMPit} + \text{Ln}\beta_3\text{GRDPit} + \text{Ln}\beta_4\text{IPCit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Ln	: Logaritma natural
MW	: Upah Minimum Propinsi
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: koefisien regresi
CPI	: IHK
EMP	: TPAK
GRDP	: PDRB
IPC	: Pendapatan per kapita
i	: cross section (data panel)
t	: time series
$\varepsilon$	: error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penaksiran Model

Untuk melihat seberapa besar jumlah Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan per Kapita mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa, maka terlebih dahulu dilakukan penaksiran model menggunakan uji *goodness of fit*. Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan, maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan per Kapita terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di Pulau Jawa adalah model *random effect*.

Model regresi faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014 dengan model *random effect* dan metode *OLS*, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variable penelitian dengan persamaan sebagai berikut.

$$\text{LnMW}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{CPI}_{it} + \beta_2 \text{EMP}_{it} + \beta_3 \text{GRDP}_{it} + \beta_4 \text{IPC}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{LnMW}_{it} = 11.7877 - 0.00162 \text{CPI} - 0.0238 \text{EMP} - 0.1140 \text{LnGDRP} + 0.5115 \text{LnIPC} + \varepsilon_{it}$$

Std. Error (-0.6021) (-3.2592) (-4.2638)  
(12.54046)

Sig (0.5525) (0.0032) (0.0003) (0.0000)

### Pembahasan

#### Pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Propinsi

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individu variabel Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Artinya, tinggi dan rendahnya Indeks Harga Konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan Upah Minimum Propinsi. Hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan Kebutuhan Hidup Layak daripada menggunakan Indeks Harga Konsumen sebagai standar upah minimum.

#### Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Propinsi

Nilai koefisien regresi TPAK sebesar -0.024393 menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan TPAK 1%, akan menyebabkan penurunan nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar 0.0024% pada periode 2010-2014.

Peningkatan pada penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat upah yang akan ditetapkan. Hal ini dikarenakan upah akan selalu menyesuaikan diri dengan penawaran di pasar tenaga kerja.

Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun.

#### Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Propinsi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar -0.115096 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan PDRB 1% akan menyebabkan penurunan nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar 0.11% pada periode 2010-2014.

Secara teoritis, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Upah Minimum Propinsi. Ketika PDRB meningkat, UMP juga



akan meningkat. Namun, dalam penelitian ini memiliki kasus yang berbeda. Nilai PDRB naik, tetapi tingkat upah akan turun, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun. Hal ini terbukti pada saat menggunakan periode waktu selama tujuh tahun (lampiran. 7) PDRB berpengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap nilai Upah Minimum Propinsi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bersales (2014) yang menggunakan jangka waktu 22 tahun (1990-2012), dan Ilham Kristanto (2011) yang menggunakan jangka waktu 21 tahun (1990-2011) menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap nilai upah minimum.

### **Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Upah Minimum Propinsi**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita baik secara individu maupun simultan signifikan dalam mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar 0.512724 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita 1% akan menyebabkan kenaikan Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar 0.51% pada periode 2010-2014.

Peningkatan pendapatan per kapita mampu meningkatkan nilai Upah Minimum

Propinsi. Hal ini dikarenakan tingkat upah akan menyesuaikan tingkat kemakmuran suatu daerah. Jika tingkat kemakmuran suatu daerah naik, maka tingkat upah juga akan naik. Pendapatan per kapita digunakan sebagai pedoman kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Upah Minimum Propinsi karena pendapatan per kapita ini menjadi indikator standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Adanya perbedaan nilai upah minimum di Pulau Jawa antara satu provinsi dengan provinsi lain. Rata-rata nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa paling tinggi ditempati oleh DKI Jakarta, dan paling rendah ditempati oleh Propinsi Jawa Tengah. Hampir semua Propinsi di Pulau Jawa menetapkan nilai Upah Minimum Propinsi di bawah nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun, sementara penelitian lain menggunakan jangka waktu yang panjang, sekitar dua puluh tahunan, sedangkan untuk Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Perubahan yang terjadi pada nilai

Upah Minimum Propinsi dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti sebesar 86.73%. Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

### **Saran**

Perlu membuat peraturan perundang-undangan baru tentang upah minimum yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun buruh, sehingga tercipta hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama membicarakan masalah upah. Selain itu, adanya peningkatan penawaran tenaga kerja akan menurunkan tingkat upah, sehingga perlu digalakkan program kewirausahaan untuk mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arnaud, Sebastien St. 2005. The Rise and Fall of Provincial Minimum Wages : Labor Movement, Business Interest and Partisan theory. *Sociological Journal*: USA. Department of Sociology, University of Toronto.
- Gujarati, Damodar N, Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadono Sukirno. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Yamin, Lien, A Rachmach, Heri Kurniawan. 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan